



PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI

NOMOR : 19/SK/KPN/I/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI (WBBM)

PADA PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI

KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI

Menimbang : 1. Bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Pengadilan Negeri Gunung Sitoli untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

2. Bahwa sebagai pedoman dalam Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli memerlukan petunjuk pelaksanaan untuk menindaklanjuti kebijakan yang lebih tinggi dengan berfokus pada tujuan, sasaran, dan indikator pencapaian dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

3. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Keputusan ini dianggap mampu untuk menjalankan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 52 tahun 2014 tentang Pedoman



Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah

4. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Wbi.st/eo/owj.ng System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya ;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI ;

KESATU : Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) dengan susunan keanggotaan sebagaimana Terlampir dalam Surat Keputusan ini ;



- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah:
- a. Menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas, dengan memprioritaskan pada target tujuan pembangunan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;
 - b. Memberikan dukungan pada masing-masing unit pelayanan untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli.
 - c. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring-evaluasi, pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli ;

- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Salinan surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Gunung Sitoli, 12 Januari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli

Zulfadly



Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
Nomor : 19 /KPN/SK/I/2026
Tanggal : 12 Januari 2026

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI
(WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Zulfadly, S.H.,M.H	KPN Gunung Sitoli	Pembina Pembangunan ZI
2	Hengky Alexander Yao, S.H.,M.H.	Hakim	Ketua Pembangunan ZI
3	Leotua Hatoguan Tampubolon, S.H.,M.H.	Panitera	Koordinator Teknikal
4	Erwin Harefa, S.H.	Sekretaris	Koordinator Operasional
AREA I : MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Hengky Alexander Yao, S.H.,M.H.	Hakim	Koordinator
2	Roni Syahputra Waruwu, S.H.	Panitera Pengganti	Anggota
3	Yovani Aprillya, A.Md	Panitera Pengganti	Anggota
4	Adnan Brilian Ulapia, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Anggota
5	Ani Martatina Telaumbanua,A.Md.	Pengelola Penanganan Perkara	Anggota
6	Weliramah Harefa, A.Md.	Pengelola Layanan Operasiona	Anggota
7	Aperianus Mendrofa, A.Md.	Pengelola Layanan Operasiona	Anggota
AREA II : PENATAAN TATALAKSANA			
1	Gabriel Lase, S.H.	Hakim	Koordinator
2	Ikuti Telaumbanua, S.H	Panitera Pengganti	Anggota
3	Affection E.M.Gulo, S.Kom.	Jurusita Pengganti	Anggota
4	Sahat Wira Josafat Simorangkir, S.E.	Penata Layanan Operasional	Anggota
5	Finola Br. Pasaribu, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Anggota
6	Darman Togi Zebua, A.Md	Dokumentalis Hukum	Anggota
7	Ikhtiarman Zebua	Operator Layanan Operasional	Anggota



AREA III : PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM			
1	Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H.	Hakim	Koordinator
2	Berlianna S.Laia, S.H	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
3	Melvi Sinaga, A.Md.	Pengelola Penanganan Perkara	Anggota
4	Melva Zega, A.Md	Dokumentalis Hukum	Anggota
5	Wirni Sandroto, S.E	Penata Layanan Operasional	Anggota
6	Yusnidar Lase, S.E	Penata Layanan Operasional	Anggota
7	Firmansyah Tanjung	Operator Layanan Operasional	Anggota
AREA IV : PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1	Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H.	Hakim	Koordinator
2	Wilpen Fernando S.S.Kom	Kasubbag PTIP	Anggota
3	Trisman Zandroto	Panitera Muda Pidana	Anggota
4	Deyendi Molore Manalu, S.Sos.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4	Eko Tarihoran, S.T	Teknisi Sarana dan Prasarana	Anggota
5	Meniati Hura, S.E	Penata Layanan Operasional	Anggota
6	Agusman Lase	Operator Layanan Operasional	Anggota
AREA V : PENGUATAN PENGAWASAN			
1	Roberto Sianturi, S.H.	Hakim	Koordinator
2	Anuar Gea, S.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota
3	Rahel O.Sianipar, A.Md.,A.B.	Arsiparis Terampil	Anggota
4	Niken Nababan, A.Md.	Pengelola Data dan Informasi	Anggota
5	Asali Lase, S.E.	Operator Layanan Operasional	Anggota
6	Anfawan Zebua	Operator Layanan Operasional	Anggota
AREA VI : PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1	Alfan Perdana, S.H.	Hakim	Koordinator
2	Alius Lase, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
3	Fenus Juli Almin Mendrofa	Jurusita	Anggota
4	Syahrir Budiman	Jurusita	Anggota



5	Yakub Frans Sihombing, S.H.,M.H	Panitera Pengganti	Anggota
6	Hagaina Monica Br.Tarigan, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Anggota
7	Jimid Hatisaro Gea, A.Md	Dokumentalis Hukum	Anggota

Gunung Sitoli, 12 Januari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli

Zulfadly

